

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013**

SKRIPSI

OLEH :

**DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang
Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Nama : Dodi Akbar Supriyadi

NPM : 10.851.0003

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd., M.AP
Pembimbing I

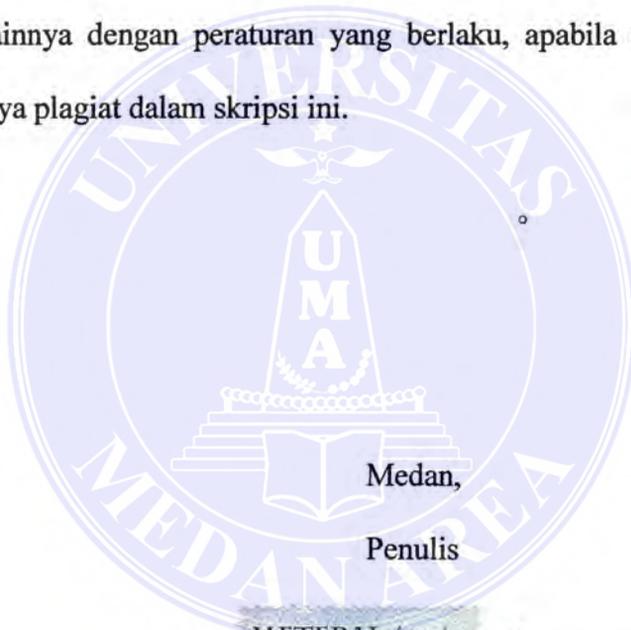

Ismail Fahmi, M.Si
Pembimbing II



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,

2014

Penulis

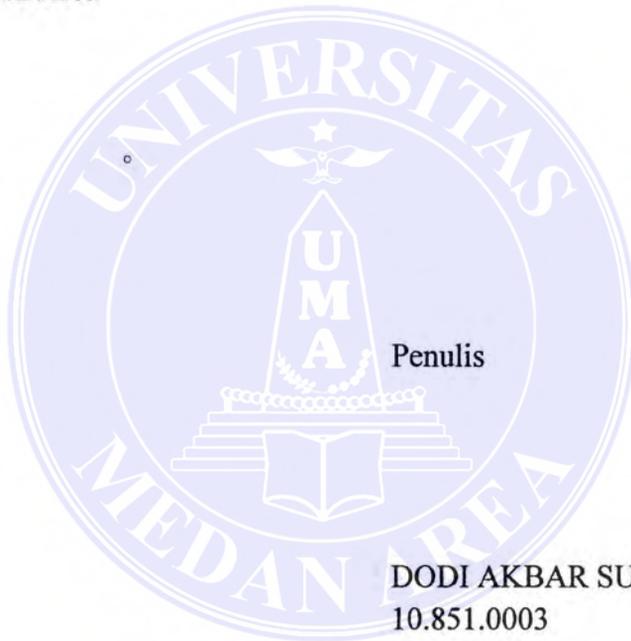


DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Pakam pada tanggal 13 Januari 1974 dari ayah yang bernama M.Nuramsyah dan ibu yang bernama Sri Suryani. penulis merupakan putra ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara.

Tahun 1992 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan pada tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003

A B S T R A K

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN DELI SERDANG DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013

Oleh :

DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pemilihan Umum merupakan bentuk perwujudan demokrasi karna didalam negara demokrasi partisipasi rakyat didalam kehidupan bernegara sangat menentukan. Pemilihan umum dinegara Republik Indonesia ada beberapa jenis yaitu Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPR & DPD), Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 yang diikuti 5(lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu 1. Pasangan Gatot Pujo Nugroho/Tengku Erry Nuradi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Patriot. 2. Pasangan Chairuman Harahap/Fadly Nurzal diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, 3.Pasangan Gus Irawan/Sukirman diusung Partai Gerindra,Partai Amanat Nasional dan Partai Buruh, 4.Effendi Simbolon/Jumiran Abdi yang diusung PDI-Perjuangan,Partai Damai Sejahtera dan PPRN, 5. Amri Tambunan/RE.Nainggolan diusung Partai Demokrat.

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dianggap kuat dan legitimasi tingkat partisipasi pemilih harus besar sehingga hasil yang diperoleh tsb dapat merupakan cerminan dari keinginan dari masyarakat secara dominan. Untuk meningkatkan tingkat antusiasme pemilih dilakukanlah upaya upaya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak peduli, dan menolak memberikan suaranya dapat ditekan serendah mungkin.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan ketidakpedulian masyarakat dilakukan usaha-usaha prepentif dengan melakukan sosialisasi,salah satu lembaga yang melakukan sosialisasi adalah Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang yang berperan sebagai informator,motifator dan fasilitator dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci : Perananan Badan Kesbang, Sosialisasi Pemilukada, Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRACT

ROLE OF THE BOARD OF UNITY NATIONS DELI SERDANG DISSEMINATION IN THE HEAD OF PROVINCIAL ELECTION YEAR 2013 NORTH SUMATERA

By :

DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003
Program Studi Ilmu Pemerintahan

General Election is the embodiment of democracy because in a democracy the people's participation in civic life is crucial. The elections of the Republic of Indonesia country there are several types of Election of Members of the Legislative (Parliament and Council), Presidential Election, General Election of Provincial and Regency / City.

At the local elections in North Sumatra Province held on March 7, 2013, followed five (5) pairs of candidates Governor and Deputy Governor ie 1. Pair Gatot Pujo Nugroho / Tengku Erry Nuradi carried by the Prosperous Justice Party and Patriot Party. 2. Pair Chairuman Harahap / Fadly Nurzal carried the Golkar Party, the United Development Party, 3. pasangan Gus Irawan / Sukirman carried Gerindra, the National Mandate Party and the Labour Party, 4. Effendi Simbolon / Jumiran Abdi that carried PDI-P, the Prosperous Peace Party and PPRN, 5. Amri Tambunan / RE. Nainggolan carried the Democratic Party.

Regional Head General Election results are considered robust and legitimacy of voter turnout should be great so that the results obtained can be reached from a reflection of the desire of the dominant society. To increase the level of voter enthusiasm effort was undertaken efforts to improve the sense of responsibility towards their voting right by the community, so that people do not care, and refused to give his voice could be reduced as low as possible.

To increase public awareness and pressing public indifference preventive efforts made by socializing, one of the institutions are socializing National Unity Deli Serdang which acts as Informator, motifator and facilitator in the regional election in North Sumatra province in 2013 in the region Deli Serdang regency.

Key Words : Role of the board of unity nations Deli Serdang, Socializing general election of provincial, Deli Serdang regency.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah Peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Abdul Kadir,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd, MAP selaku Pembimbing I dan Ismail Fahmi, M.Si selaku Pembimbing II serta Rudi Salam Sinaga, S.Sos, MAP sebagai Sekretaris, yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Drs. H.M.Ali Yusuf Siregar, MAP sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Deli Serdang, Drs.Aler Simarmata, MIP sebagai Sekretaris di Badan Kesatuan Bangsa Kab.Deli Serdang, Idris Siregar,SH sebagai Kepala Bidang Demokratisasi dan Drs. Mawan sebagai Kepala Sub Bidang Pemilu dan HAM di Badan Kesatuan Bangsa Kab.Deli Serdang yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu serta Seluruh Keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis

DODI AKBAR SUPRIYADI
10.851.0003



DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Pemilu.....	7
2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	10
2.3. Pengertian Partisipasi Politik.....	11
2.4. Bentuk Partisipasi Politik.....	14
2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	16
2.6. Perilaku Politik.....	22
2.7. Sosialisasi.....	23
2.8. Sosialisasi Politik.....	24
BAB III METODA PENELITIAN	27
3.1. Populasi dan Sampel.....	27
3.2. Sumber Data.....	27

3.3. Variabel dan Defenisi Operasional	28
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5. Metode Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Berdirinya Badan Kesbang Kab.Deli Serdang.....	33
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	34
4.3. Struktur Organisasi	49
4.4. Visi dan Misi.....	50
4.5. Peran Badan Kesbang	50
4.6. Pelaksanaan Sosialisasi.....	55
4.7. Kendala Yang Dihadapi.....	57
4.8. Cara Mengatasi Kendala.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar pada 7 Maret 2013 diikuti sebanyak 5 pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. ke-5 pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara, yakni 1. Pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Patriot, dan Partai Bintang Reformasi 2. Pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal diusung Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Buruh 3. Pasangan Effendi Simbolon-Djumiran Abdi yang diusung PDI-Perjuangan, Partai Damai Sejahtera dan PPRN. 4. Pasangan Gus Irawan Pasaribu-Sukirman diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Barisan Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Matahari dan Partai Pelopor. 5. Pasangan Amri Tambunan-Rustam Effendi Nainggolan yang diusung oleh Partai Demokrat.

Para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ini berasal dari berbagai suku, agama dan ras. seperti pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry merupakan pasangan suku Jawa-Melayu, yang masing-masing beragama Islam. pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal merupakan pasangan suku Tapanuli

Selatan, yang masing-masing beragama Islam. pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman merupakan pasangan suku Tapanuli-Jawa, masing-masing beragama Islam, pasangan Effendi Simbolon-Djumiran Abdi merupakan pasangan suku Batak/Tapanuli Utara-Jawa, masing-masing beragama Kristen-Islam dan pasangan Amri Tambunan-RE Nainggolan merupakan pasangan suku Batak-Batak, masing-masing beragama Islam-Kristen.

Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terbesar setelah kota Medan. jumlah DPT Kabupaten Deli Serdang adalah 1.428,876 jiwa (pemilih laki-laki 710.347 jiwa dan perempuan 718.529 jiwa) dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.840. melihat kondisi ini maka keberadaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sangat penting khususnya bagi pasangan yang ingin memenangkan pemilukada tersebut.

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan di Kabupaten Deli Serdang adalah Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang. sebagai lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah (Bupati) di bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan perlindungan masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang dinamis dan pluralis, memberikan suatu tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur.

sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Sumatera Utara Tahun 2013 khususnya pengenalan para calon gubernur (cagub) di Kabupaten Deli Serdang dinilai masih lemah. sehingga warga di daerah pinggiran masih belum banyak yang tahu atau mengenal para kandidat. momentum pemilukada 2013 sepertinya kurang menarik bagi masyarakat. ukurannya dapat dilihat dari media yang kurang ramai memberitakan. tidak seperti pemilukada DKI Jakarta, media ramai sekali memberitakan sosok Joko Widodo, pemilukada seharusnya bisa menyenangkan bagi masyarakat.

Hal lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pemilukada adalah hingga saat ini belum sesuai harapan masyarakat terhadap proses pemilihan umum yang sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang yaitu Drs.H.M. Ali Yusuf Siregar, MAP.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bahagian dari pembangunan ialah pembangunan politik sebagai wujud dari pembangunan politik dan pengamalan demokrasi yang amat penting ialah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) termasuk pemilukada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

Adapun peranan dan partisipasi yang dapat dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang menjelang pemilukada, saat pelaksanaan, dan sesudah pemilukada antara lain:

- Melakukan deteksi dini terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sekecil apapun gejala dan potensi gangguan kamtibmas harus dideteksi, kemudian dilakukan pendekatan, musyawarah dan pemecahan masalah.
- Meningkatkan peranan dan partisipasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya. hal ini penting karena indikator suksesnya pemilukada antara lain besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. semakin besar keikut-sertaan masyarakat dalam pemilukada, semakin besar legitimasi pemilukada dan gubernur /wakil gubernur terpilih.
- Berperanan dan berpartisipasi aktif dalam memberi pencerahan, penyadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mencegah dan menolak politik uang, karena politik uang akhirnya akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena, setelah terpilih menjadi gubernur/wakil gubernur, hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan selama menjadi pengantin pada saat pemilukada. Selain itu, dari segi hukum positif, hukum agama dan norma mengharamkan politik uang. bahkan dalam ajaran agama, Tuhan mengutuk mereka yang menyogok dan menerima sogok. ditegaskan bahwa penyogok dan penerima sogok tempatnya dineraka. politik uang adalah nama lain dari perbuatan menyogok dan menerima sogok, yang sangat merugikan masyarakat dan negara, sehingga diharamkan untuk dilakukan oleh siapapun.

- Memberi teladan kepada pemilih untuk memilih calon gubernur/wakil gubernur yang dianggap terbaik. semua calon gubernur/wakil gubernur adalah kader terbaik bangsa, tetapi masyarakat penting dipandu untuk memilih calon gubernur/wakil gubernur dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan Sumatera Utara di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013”.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013”.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian terfokus terhadap permasalahannya, akan lebih baik jika dibuat pembatasan masalah. Pada penelitian ini adapun masalah yang ingin diteliti adalah:

- Penelitian ini akan melihat peranan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi pemilu pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013
- Analisis studi penelitian ini akan lebih terfokus pada kendala yang dihadapi dalam sosialisasi pemilu pada Provinsi Sumatera utara 2013.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui peran apa saja yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Provinsi Sumatera Utara tahun 2013”.

Selain beberapa tujuan, sebuah penelitian juga diarahkan agar banyak berdayaguna dan memiliki manfaat bagi peneliti maupun masyarakat luas oleh sebab itu adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah :

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dalam melihat fenomena politik yang terjadi di masyarakat.
- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khasanah keilmuan dan mengembangkan konsep maupun teori yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat.
- Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam kaitannya dengan tugas sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemilu

Pengertian pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. (Harris, 2008:3).

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu

memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. siklus ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. (Thaib, 2009:98).

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan

satu sama lain. pertama, sebagai sarana legitimasi politik. fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam system politik yang mawadahi format pemilu yang berlaku. melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. dengan demikian pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Menurut Ginsberg dalam Thaib (2009:101), fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganegara. (Mashudi, 2003:65).

Tidak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya. dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat

ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. pemilihan akan system pemilu adalah salah satu yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi, kebanyakan dari system pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada didalam masyarakat serta sejarah yang mempengaruhinya.

2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. kelahiran pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. melalui pemilihan umum kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilukada ini rakyat dengan bebas untuk menentukan pilihannya.

Proses pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa

tahapan, dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya pemerintahan daerah. (Supriady, 2002:61).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana kepala daerah dipilih secara demokratis, dan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang demokratis, namun merupakan sebuah ciri khas adanya modrenisasi politik.

Partisipasi politik juga merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk

terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. kebijakan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi salah satu anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen atau sebagainya. (Budiardjo, 2008:2).

Berbicara mengenai partisipasi politik yakni berbicara mengenai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Herbert McClosky, dalam *International Encyclopedia of The Sosial Science*, menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melauai mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum. (McClosky, 2008:5).

Selain pendapat dari ahli sebelumnya, Samuel P.Huntington dan Joan. H. Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah sebuah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Huntington, 2000:2).

Jika dikaji dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, partisipasi politik itu akan menjadi bervariasi bersamaan dengan perbedaan-perbedaan sistem politik yang berlangsung dalam suatu negara, akan tetapi pola dasarnya adalah sama. Penelitian Milbrath membuktikan ini, sehingga ia menyimpulkan bahwa partisipasi politik bervariasi yang berkaitan dengan empat faktor, yaitu: pertama, sejauhmana orang menerima berkaitan perangsang politik. kedua, karakteristik pribadi seseorang. ketiga, karakteristik sosial seseorang. keempat, keadaan politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. keempat hal tersebut yang menjadi dasar dari pada individu untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Partisipasi sebagai suatu kegiatan politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. yang termasuk kedalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan suatu alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pimpinan pemerintahan. partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. sebaliknya partisipasi pasif merujuk pada kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. partisipasi pasif berorientasi kepada proses output. disamping itu terdapat sejumlah masyarakat yang tidak tergolong kedalam katagori aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput). (Surbakti, 2002:182).

2.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Secara sederhana jenis partisipasi politik dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu:

- Partisipasi secara konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga.
- Partisipasi secara non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi di mana prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Suara • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi dengan pejabat politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindak kekerasan terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) • Perang Gerilya • Revolusi

Sumber: Gabriel A. Almond (dalam Leo Agustino, 2007:61)

Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. keikutsertaan dan ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu secara sederhana menunjukkan komitmen partisipasi warga. tapi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasan terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.

Di Indonesia istilah golput lebih dikenal daripada istilah apatis dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Istilah ini muncul tahun 1970-an, mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum orde baru karena dinilai tidak demokratis. golput adalah proses politik, merupakan refleksi ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan yang menggunakan pemilu untuk melegitimasi rezim otoritarian.

Sementara bentuk partisipasi politik yang kedua, biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan tidak jarang merusak fasilitas umum.

Selain itu Michael Rush dan Philip Althoff juga mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. hierarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. sedangkan hierarki terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktifitas politik

apapun. semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan dalam tabel hierarki partisipasi politik di bawah ini dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

2.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang ataupun masyarakat untuk mengambil keputusan dalam pemilihan umum. berikut ini adalah beberapa faktor yang yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik, yaitu:

- Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan banyak mempengaruhi keinginan seseorang (manusia) dalam memenuhi kehidupan. R.Hayar mengatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan kekuasaan. Pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dapat memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan yang jernih dan keterampilan yang mantap. oleh karena itu, pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadikan semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikannya, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.

- Status Sosial Ekonomi

Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan yang erat dengan

pertumbuhan sosial ekonomi. artinya bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. partisipasi ini juga tentunya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasi politiknya menunjukkan derajat kepentingan mereka. kedudukan sosial tertentu misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tinggi dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi dari pada orang yang hanya memiliki status sosial yang rendah. orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

Setidaknya ada dua indikator yang biasa digunakan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pekerjaan. lazimnya variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. namun dengan menggunakan preposisi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku tidak memilih pada masyarakat. artinya, jika tingginya tingkat pendapatan berhubungan dengan kehadiran pemilih, itu berarti rendahnya tingkat pendapatan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih, begitu juga dengan indikator tingkat pekerjaan.

- Aktifitas Kampanye Dan Media Massa

Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. namun demikian yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkat dan bentuk partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut (Mas' oed, 2006:49).

Media massa berfungsi sebagai penyampaian informasi tentang perkembangan politik nasional maupun lokal. media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai pengaruh kuat tidak saja bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah. media massa dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan media massa juga mencerminkan jiwa zaman dari suatu pemberitaan. (Noveri, 2007:3).

Media massa juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dikarenakan para calon kandidat menyampaikan visi dan misinya melalui media yang ada, baik itu media elektronik seperti televisi, radio, dan media cetak lainnya seperti koran atau majalah.

- Faktor Budaya Politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat., setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya seperti masyarakat umum dan para elitnya. kehidupan manusia di dalam masyarakat memiliki peranan yang penting dalam sistem politik suatu negara. manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lainnya untuk berinteraksi dalam berupaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Almond dan Verba mendefenisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem tersebut.

Dengan memahami budaya politik, maka kita akan memperoleh setidaknya dua manfaat, yakni: pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dan dukungannya serta

orientasinya terhadap sistem politik itu. kedua, dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Almond dan Verba melihat bahwa pandangan tentang objek politik terdapat tiga komponen yakni:

- Orientasi Kognitif

Yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta proses input dan outputnya.

- Orientasi Afektif

Yaitu berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilanya.

- Orientasi Evaluatif

Yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Bentuk-bentuk budaya politik dapat dibedakan berdasarkan dua hal yakni:

- Berdasarkan sikap yang ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk memadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap seseorang terhadap orang lain. pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan dan sifat toleransi.

- Budaya politik militan

Budaya politik militan adalah suatu budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha untuk mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. bila terjadi krisis, maka yang

dicari adalah kambing hitamnya, bukan mencari sumber masalah yang disebabkan oleh peraturan yang salah.

- Budaya Politik Toleransi

Budaya politik toleransi adalah suatu budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalau membuka pintu untuk bekerja sama.

- Berdasarkan orientasi politiknya

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. perbedan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik dimana setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda pula. dalam realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

- Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu dimana tingkat partisipasinya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Menyangkut budaya politik yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. karena wilayah yang terbatas acapkali pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri. yang menonjol dalam budaya politik jenis ini adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya kewenangan dan kekuasaan politik dalam masyarakat.

- Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat yang

bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menerima saja atas segala kebijakan dan keputusan para pemegang pembuat kebijakan tersebut.

- Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan.

Menurut pandangan Morris Rosenberg bahwa ada tiga alasan mengapa orang-orang enggan berpartisipasi politik dikarenakan oleh sebab berikut ini:

- Konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas politik pada umumnya. Karena dengan ikut serta dalam aktifitas politik tertentu dilihat sebagai suatu ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan mereka.
- Bahwa individu dapat menganggap aktifitas politik sebagai kerja yang sia-sia saja. Individu merasa ada jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. karena jurang pemisah yang sedemikian besarnya sehingga dianggap bahwa tidak ada lagi aktifitas politik yang kiranya dapat menjembatani.
- Bahwa memacu diri untuk bertindak atau sebagai perangsang politik adalah faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik. maka dengan adanya perangsang politik yang seperti itu membuat atau mendorong ke arah

perasaan yang semakin besar bagi dorongan apatis. dengan demikian individu maupun masyarakat lebih merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai sifat pribadi daripada sifat politiknya.

2.6. Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat, kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antarlembaga pemerintahan dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari perilaku politik. perilaku politik merupakan salah satu dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik masih ada perilaku yang lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik.

Perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. yang berhak melakukan kegiatan politik adalah seluruh warga negara indonesia.namun,yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, tetapi masyarakat dapat dan berhak untuk

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tersebut, dan dengan adanya sikap tersebut maka masyarakat telah melakukan perilaku politik tersebut.

Berkaitan dengan perilaku politik, sesuatu yang perlu dibahas adalah sikap politik. Sikap mengandung tiga komponen yaitu, kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecendrungan bertingkah laku. maka sikap politik dapat diartikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut dengan munculnya sikap tersebut maka dapat diperkirakan perilaku politik akan muncul juga.

2.7. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Jenis-jenis sosialisasi

- Sosialisasi primer (dalam keluarga);

Peter L.Berger dan Luckman mendefenisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat.

- Sosialisasi skunder (dalam masyarakat).

Sosialisasi skunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu.

Tipe – tipe sosialisasi

- Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga yang berwewenang menurut

ketentuan yang berlaku dalam suatu negara seperti pendidikan disekolah dan militer.

- **Informal**

Sosialisasi tipe ini terdapat dimasyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti teman, sahabat, sesama anggota klub dan kelompok-kelompok sosial yang ada dimasyarakat.

Pengertian sosialisasi menurut beberapa Sosiolog:

- **Charlotte Buhler.**

Sosialisasi adalah proses individu – individu yang belajar menyesuaikan diri.

- **Peter Berger.**

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak akan belajar menjadi Seseorang.

- **Bruce J. Cohen.**

Sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara dalam kehidupan.

Tujuan sosialisasi diantaranya adalah:

- Memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu masalah.
- Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien.
- Membiasakan individu dengan nilai-nilai pokok yang ada dimasyarakat.

2.8. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh yang mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksi terhadap gejala-gejala politik.

Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff yaitu :

- Melatih individu.

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku didalam sebuah sistem politik, misalnya di Indonesia yang menganut ideologi Pancasila sehingga semenjak sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi diberlakukan pembelajaran pendidikan tentang ideologi Pancasila.

- Memelihara suatu sistem politik dan pemerintahan

Dalam melakukan sosialisasi politik Rush dan Althoff membagi dalam 3 cara yaitu :

- Imitasi

Melalui imitasi seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu yang lainnya.

- Instruksi

Gaya ini berkembang dilingkungan militer atau organisasi lain yang terstruktur secara resmi melalui rantai komando.

- Motivasi

Melalui cara ini individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkahnya sendiri dengan orang lain.

Agen – agen sosialisasi politik.

- Keluarga.

Merupakan sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh karna itu keluarga adalah lembaga sosial yang paling dekat yang

memiliki pengaruh kuat terhadap pandangan politik satu individu.

- Sekolah.

Sekolah menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik skunder yang kebanyakan kita mengetahui sistem politik negara dan pemerintahan dari lembaga ini.

- Peer group.

Adalah teman sebaya yang mengelilingi seorang individu, apa yang dilakukan seorang teman mempengaruhi tindakan kita.

- Media massa.

Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual, surat kabar cetak, internet ataupun yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi pandangan politik kita.

- Partai Politik.

Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara seperti agama, keadilan, nasionalisme dan kebudayaan . melalui partai politik dan kegiatannya individu dapat mengetahui kegiatan politik dinegara.

- Pemerintah.

Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik, menjalankan sistem politik dengan stabilitasnya.

(id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi/ diakses tanggal 10 Januari 2014).

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

- **Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang.

- **Sampel**

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya, Berdasarkan pengertian di atas maka sampel penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu 4 orang pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dan 2 orang tokoh masyarakat.

3.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- **Data Primer** : yaitu penelitian lapangan, merupakan pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa orang responden penelitian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 11/8/23

- Data Sekunder: yaitu penelitian kepustakaan, mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan, jurnal, koran dan media atau literatur lainnya yang dapat menambah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian. dengan demikian diharapkan diperoleh data sekunder sebagai kerangka kerja teoritisnya.

3.3. Variabel dan Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

- Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang.
Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu instansi yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang.
- Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana atau alat bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dapat duduk di pemerintahan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi

3.4. Metode Pengumpulan Data

Agar sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, pedoman wawancara.

- Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko C, 2007 : 70).

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono 2010:158)

Metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada pemilukada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak keduanya.

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti (Rackman M, 1999:69).

Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini misalnya, arsip, jumlah siswa dan sebagainya. teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian .

- Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan(Narbuko C, 2007:83).

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu.

Wawancara menurut J. Inchausti dan Guba antara lain : mengkonstruksi mengenai

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. (Moeloeng 2011:186).

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Bogdan dan Biklem (dalam Moleong 2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Miles H, 1992:16-20).

- Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara dan observasi.

- Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

- Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles H, 1992:17-18).

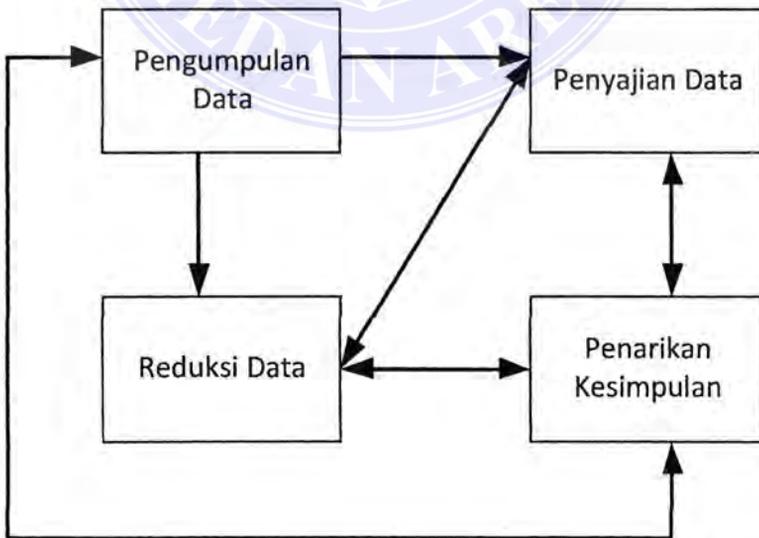
Penyajian data merupakan analisis merancang deretan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis bentuk data yang dimasukan dalam kotak-kotak matrik.

- Verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin atau sebab akibat dan proporsi (Rahman M,1999:3)

Secara skematis proses tersebut dapat digambarkan , sebagai berikut :

Gambar 2
Proses Skematis



Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahapan pengumpulan data. karena kebanyakan data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. setelah reduksi kemudian diadakan sajian data, selain pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang “Peran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang Dalam Sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang” yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa /Kesbang berperan dalam memberikan sosialisasi. Peranannya antara lain sebagai informator, motivator dan fasilitator.
2. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah Sumatera Utara dilakukan didaerah – daerah dengan masyarakat yang sulit dalam mengakses dan memperoleh informasi, terutama mengenai pemilihan umum kepala daerah, sehingga dapat menimbulkan minat dan semangat masyarakat untuk ikut serta pada pemilukada Provinsi Sumatera Utara;
3. Beberapa kendala yang dihadapi pada proses sosialisasi ialah mengenai letak beberapa daerah penyuluhan yang sulit, keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut, ketidakpahaman masyarakat mengenai pemilu sehingga menyurutkan minat mereka dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara, serta luasnya wilayah kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Kesatuan bangsa, sosialisasi pemilihan umum kepala daerah harus dilakukan dengan menambah personil dan narasumber dari KPU agar materi penyuluhan dapat mudah dipahami oleh masyarakat, Proses sosialisasi harus dibuat semenarik mungkin. Dengan begitu masyarakat akan lebih mengetahui arti pentingnya suatu pemilihan umum.
2. Bagi masyarakat yang memiliki minat yang minim dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dilakukan pendekatan – pendekatan yang lebih sehingga dapat membuat masyarakat tertarik dan semakin mengerti akan hak nya yang harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Sosialisasi idealnya menjadi tanggung jawab bersama tidak merupakan tugas dan tanggung jawab satu lembaga saja dalam hal ini cuma Badan Kesatuan Bangsa/Kesbang saja tetapi semua pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga menghasilkan suatu keputusan yang lebih terlegitimasi yang mencerminkan pilihan masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harris, Syamsudin, 2008, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Huntington P. Samuel dan Joen Nelson. 2000. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashudi, 2003, *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju.
- Mas'ood, dkk, 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- McClosky, Herbert, dalam Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Noveri, dkk, 2007. *Peranan media massa local bagipembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Sumatera Barat, Sumatera Barat*: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Singarimbun, Masridan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Supriady, dkk, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Zainuddin, A. Rahman. 1996. *Antara Politik dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jurnal Ilmu Politik 16